



REPUBLIK INDONESIA

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI (APBD 2012)

PERHATIAN

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2012.
Daftar ini dikirim ke BPS paling lambat akhir **Bulan Juni 2012**.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.



BADAN PUSAT STATISTIK

**BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.1	Pajak Daerah	
1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.2	Pajak Kendaraan di Air	
1.1.3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.4	Bea Balik Nama Kendaraan di Air	
1.1.5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.6	Pajak Air Permukaan	
1.1.7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.1.8	Lainnya.....	
1.2	Retribusi Daerah	
1.2.1	Retribusi Jasa Umum	
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.6	Lainnya.....	
1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	
1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.6	Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.9	Lainnya.....	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	
1.2.3.1 Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.2 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.3.4 Lainnya.....	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2 Jasa Giro	
1.4.3 Pendapatan Bunga	
1.4.4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	
1.4.5 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1.4.7 Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14 Lainnya.....	
2 DANA PERIMBANGAN	
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
2.1.1 Bagi Hasil Pajak	
2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.3 Lainnya.....	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribuan Rp)
(1)	(2)
2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
2.1.2.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH)	
2.1.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3 Dana Reboisasi	
2.1.2.4 Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	
2.1.2.5 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6 Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7 Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8 Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9 Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10 Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11 Lainnya.....	
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.3.1 Dana Alokasi Khusus Reboisasi	
2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
3.1 Pendapatan Hibah	
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.3.4 Lainnya.....	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
3.4.1 Dana Penyesuaian	
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	

Catatan:

Total Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribuan Rp)
(1)	(2)
B BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1 Belanja Pegawai	
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	
1.4.7 Lainnya.....	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2 Belanja Bantuan Partai Politik	
1.5.3 Lainnya.....	

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.6.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6 Lainnya.....	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.7.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5 Lainnya.....	
1.8 Belanja Tidak Terduga	
2 BELANJA LANGSUNG	
2.1 Belanja Pegawai	
2.1.1 Honorarium PNS	
2.1.2 Honorarium Non PNS	
2.1.3 Uang Lembur	
2.1.4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.1.5 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.1.6 Lainnya.....	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2 Belanja Bahan/Material	
2.2.3 Belanja Jasa Kantor	
2.2.4 Belanja Premi Asuransi	
2.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan	

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18 Belanja Pemeliharaan	
2.2.19 Lainnya.....	
2.3 Belanja Modal	
2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	

BLOK IV: ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorim	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	

Catatan :
Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V: ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.1 Perencanaan Pembangunan	
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3 Komunikasi dan Informasi	
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	
1.6 Statistik	
1.7 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	
3.1 Perhubungan	
3.2 Ketenagakerjaan	
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4 Penanaman Modal	
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6 Pertanian	
3.7 Kehutanan	
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	
3.12 Ketransmigrasian	
3.13 Ketahanan Pangan	
3.14 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

BLOK V: ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
5.1 Pekerjaan Umum	
5.2 Perumahan	
5.3 Lainnya.....	
6 KESEHATAN	
6.1 Kesehatan	
6.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3 Lainnya.....	
7 PARIWISATA DAN BUDAYA	
7.1 Pariwisata	
7.2 Kebudayaan	
7.3 Lainnya.....	
8 PENDIDIKAN	
8.1 Pendidikan	
8.2 Pemuda dan Olah Raga	
8.3 Perpustakaan	
8.4 Lainnya.....	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2 Sosial	
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4 Lainnya.....	

<p>Catatan :</p> <p>Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung</p>
--

BLOK VI. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012	
Jenis Pembiayaan	Jumlah (Ribuan Rp)
(1)	(2)
D PEMBIAYAAN	
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Catatan :

Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)